

# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA



# 2020



# **INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA**



# **2020**

# **INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA 2020**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| ISBN             | : 978-602-567-360-3                  |
| No Publikasi     | : 71000.2130                         |
| Katalog BPS      | : 4601008.71                         |
| Ukuran Buku      | : A4                                 |
| Jumlah Halaman   | : viii + 17 halaman                  |
| Naskah           | : BPS Provinsi Sulawesi Utara        |
| Gambar Kulit     | : BPS Provinsi Sulawesi Utara        |
| Penyunting       | : BPS Provinsi Sulawesi Utara        |
| Diterbitkan Oleh | : @BPS Provinsi Sulawesi Utara       |
| Dicetak oleh     | : CV. Bahu Bahtera Indah             |
| Sumber Gambar    | : <i>freepik, pngtree, pinterest</i> |

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”*

**TIM PENYUSUN  
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA  
PROVINSI SULAWESI UTARA 2020**

**Pengarah**  
Asim Saputra

**Penanggung Jawab**  
Sumbodo Aji Cahyono

**Editor**  
Lutfi Alfia

**Naskah**  
Dina Atika Rahmawati

**Infografis**  
Dina Atika Rahmawati

**Tata Letak *Layout***  
Dina Atika Rahmawati

**Pembuat Tabel dan Gambar**  
Dina Atika Rahmawati



## KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerahNya sehingga Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Utara 2020 dapat diterbitkan. Publikasi ini juga menyajikan perkembangan skor IDI selama lima tahun terakhir yang dapat menunjukkan perubahan demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara melalui peristiwa-peristiwa yang terekam dari berita-berita dan dokumen pemerintahan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menyadarkan kita tentang partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan keterbukaan penyelenggara pemerintahan.

Proses pengumpulan data untuk menyusun IDI dilakukan dengan cara *review* surat kabar, *review* dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam kepada organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan tokoh-tokoh terkait yang paham dengan peristiwa-peristiwa yang dialami masyarakat di Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data ini menjadi keistimewaan bagi IDI sebagai alat ukur demokrasi yang merangkum peristiwa yang terjadi selama periode Januari – Desember tahun 2020.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang besar kepada semua pihak yang telah berperan serta dan mendukung segala aktivitas sehingga publikasi ini dapat disusun. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam menata pembangunan demokrasi dan politik Provinsi Sulawesi Utara. Besar harapan kita agar para pengambil keputusan/perencana semakin familiar dengan IDI dan menjadikannya sebagai ukuran dalam menilai demokrasi yang sedang dibangun di Sulawesi Utara.

Manado, November 2021

Kepala



Asim Saputra, SST, M. Ec.Dev



# DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Tim Penyusun Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara 2020..... | iii |
| Kata Sambutan .....   | v   |
| Daftar Isi .....  | vii |
| 1. Demokrasi.....   | 1   |
| 2. Indeks Demokrasi Indonesia .....                                       | 3   |
| 3. Tujuan dan Manfaat Indeks Demokrasi Indonesia .....                    | 5   |
| 4. Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia.....                             | 7   |
| 5. Gambaran Umum Indeks Demokrasi Indonesia .....                         | 11  |
| 6. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara .....               | 13  |
| 7. Penutup .....  | 17  |

<https://sulut.bps.go.id>





Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assiddiqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Soviet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivis-komunis menganggap rakyat yang berdaulat dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi *deficit* sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. *Freedom House* misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries* dan *partly free*.



Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Sejak tahun 2009, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini disusun oleh BPS dan Kemenko Polhukam, didukung oleh Bappenas, Kemendagri, dan UNDP. Sejak IDI 2016, UNDP sudah tidak terlibat dalam penyusunan IDI.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah pengukuran kondisi demokrasi yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, perumusan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya, IDI mempertimbangkan ciri khas persoalan Indonesia secara umum dan secara khusus di Sulawesi Utara.

Sedikitnya ada dua karakteristik utama dari praktik demokrasi, yaitu adanya perluasan peran masyarakat dan reformasi kelembagaan demokrasi yang dilakukan secara menyeluruh. Namun, perluasan peran masyarakat ini lebih banyak merefleksikan kontestasi politik dan reformasi kelembagaan juga belum banyak memberikan kontribusi terhadap pemenuhan janji demokrasi karena belum didukung oleh perilaku demokrasi yang inheren di kalangan masyarakat maupun pemerintah.

## 4 PRINSIP PENYUSUN IDI

1

IDI HANYA MENGUKUR PERKEMBANGAN DEMOKRASI POLITIK DI PROVINSI.

2

IDI HANYA MENGINDIKASIKAN POTRET DEMOKRASI DI PROVINSI. DALAM HAL INI, IDI DAPAT DIUMPAMAKAN SEBAGAI SKETSA YANG MEMBERIKAN GAMBARAN YANG CUKUP AKURAT, TIDAK DILEBIH-LEBIHKAN, DAN TIDAK PULA DIKURANG-KURANGKAN SEHINGGA MENGALAMI DISTORSI.

3

IDI BUKAN MERUPAKAN TUJUAN AKHIR TETAPI MERUPAKAN TUJUAN ANTARA UNTUK MEREALISASIKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BEBAS, AMAN ADIL, DAN SEJAHTERA.

4

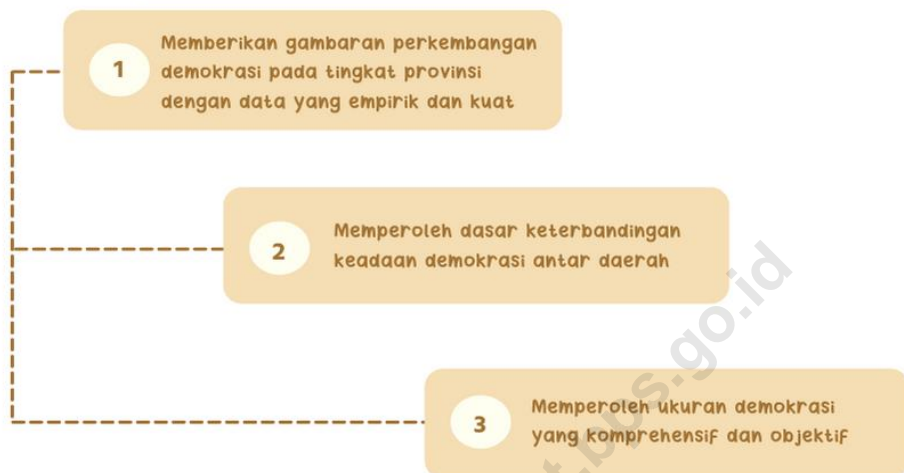
IDI JUGA DIGUNAKAN UNTUK MENGUKUR DEMOKRASI DARI DUA SISI, YAITU SISI NEGARA (PEMERINTAH) DAN MASYARAKAT.



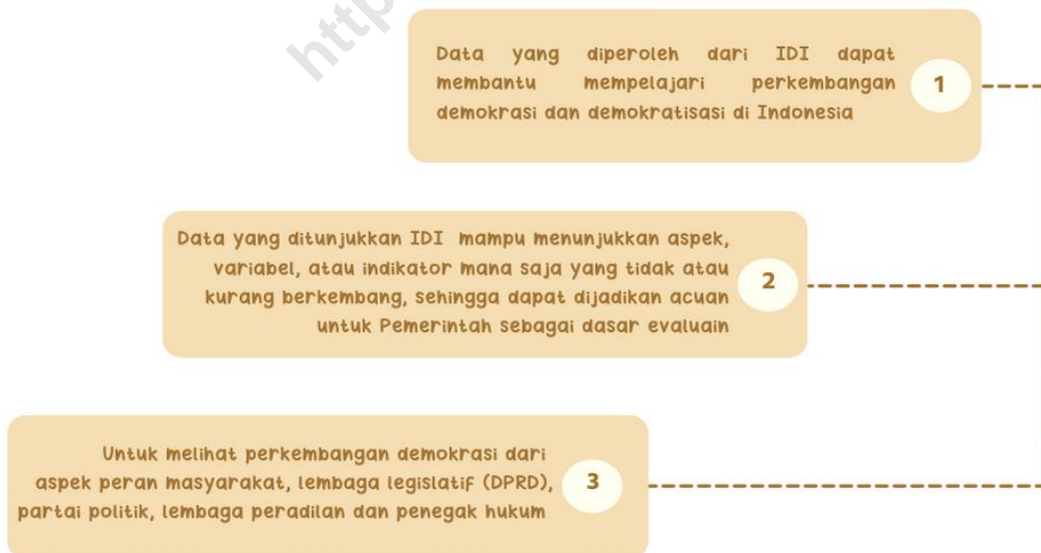
# TUJUAN DAN MANFAAT INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

3

## Tujuan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)



## Manfaat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)



5



Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan terdapat tiga tahapan pengumpulan data IDI, yaitu:

## 1. **Review surat kabar dan review dokumen**

Review surat kabar dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik surat kabar maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data *kuantitatif* (dalam kurun waktu pengamatan selama satu tahun) berkaitan dengan 3 Aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI 2020. Penggunaan dokumen sebagai sumber data IDI tidak menuntut banyak penjelasan karena pada dasarnya, dokumen resmi merupakan sumber data yang layak dan biasa dipakai dalam banyak penelitian. Penggunaan media, khususnya surat kabar, sebagai sumber data untuk mengukur demokrasi mungkin tidak lazim digunakan, sebab itu perlu mendapatkan penjelasan khusus. IDI berpendapat, surat kabarliah yang merekam kehidupan daerah, termasuk di dalamnya denyut demokrasi selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari. Bukan berarti surat kabar tidak memiliki kelemahan. IDI sepenuhnya menyadari keterbatasan surat kabar seperti kemungkinan bias-bias editorial dan wartawan, keterbatasan jangkauan liputan, keterbatasan ruang, dan keterbatasan keahlian wartawan. Namun, disamping keterbatasan tersebut, surat kabar di Indonesia adalah surat kabar yang bebas dan merupakan sumber data mengenai demokrasi provinsi yang cukup baik terlebih dalam hal yang berkaitan dengan gairah spontan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik di daerah.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media surat kabar, dan untuk ini telah dipilih satu surat kabar, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Sulawesi Utara menggunakan surat kabar Manado Post. Sementara untuk review dokumen, yang digunakan adalah semua dokumen resmi (tertulis) yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian, dan data pemilih yang dikeluarkan oleh KPUD.



## 2. Focus Group Discussion (FGD) IDI

*Focus Group Discussion* (FGD) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998:1). Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkau data *kualitatif* berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah, pertama, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data kuantitatif berkaitan dengan indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen. Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. Ketiga, menggali informasi (data *kualitatif*) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen.

## 3. Wawancara Mendalam (WM) IDI

Dilakukan untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat, atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Nara sumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Dari tiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 variabel yang kemudian dijabarkan lagi melalui 28 indikator teknis.

Penyusunan IDI dilakukan dengan cara skoring yang terdiri dari dua level yaitu level 1 merupakan skoring data kuantitatif sesuai temuan *review* surat kabar dan *review* dokumen dan level 2 merupakan skoring data kualitatif melalui *expert judgement*.

*Skoring* data kuantitatif (hasil *review* surat kabar dan dokumen) bersifat *complementary data* yang artinya data tertinggi/terbesar hasil pengukuran pada *review* surat kabar atau *review* dokumen diambil sebagai perhitungan skor. Sedangkan *skoring* data kualitatif (hasil FGD dan *in-depth interview*), pembobotan per kasus ditetapkan sebesar 75 persen dibanding kasus yang berasal dari surat kabar. Untuk informasi tentang aturan tertulis tetap dihitung 100 persen.

# METODOLOGI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

4

Tahapan selanjutnya, masing-masing aspek, variable dan indikator IDI diberikan bobot. Bobot dalam hal ini dihitung oleh juri ahli (*expert judge*) yang terdiri dari unsur perempuan, akademisi, praktisi/politisi, pejabat pemerintahan, NGO/LSM dan purnawirawan TNI/Polri, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Dari sisi penghitungan indeks, IDI dilakukan melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan angka IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Sejak tahun 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” yang sebelumnya “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.” yang sebelumnya “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.

9

# Komponen Penghitung IDI

## Aspek

## Variabel

## Indikator

**Kebebasan Sipil**

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat  
Kebebasan Berpendapat  
Kebebasan Berkeyakinan  
Kebebasan dari Diskriminasi

2 Indikator  
2 Indikator  
3 Indikator  
3 Indikator

**Hak-Hak Politik**

Hak Memilih dan Dipilih  
Partisipasi Politik dalam  
Pengambilan Keputusan dan  
Pengawasan Pemerintahan

5 Indikator  
2 Indikator

**Lembaga Demokrasi**

Pemilu yang Bebas dan Adil  
Peran DPRD  
Peran Partai Politik  
Peran Birokrasi Pemerintah Daerah  
Peradilan yang Independen

2 Indikator  
3 Indikator  
2 Indikator  
2 Indikator  
2 Indikator

# GAMBARAN UMUM INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

5

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional tahun 2020 mencapai 73,66 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI 2019 yang capaiannya sebesar 74,92. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih dalam kategori “sedang”. Angka IDI 2020 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni:

- Aspek Kebebasan Sipil tidak terlalu fluktuatif dibandingkan dua aspek lainnya. Aspek Kebebasan Sipil pernah berada pada kategori “baik” pada periode 2009–2011 dan 2014–2015, serta mengalami titik terendah pada tahun 2016 sebesar 76,45 poin. Aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2020, dengan rata-rata nasional 79,40.
- Aspek Hak-hak Politik berada pada kategori “buruk” pada periode 2009–2013, sebelum akhirnya mengalami peningkatan pada periode 2013–2015, dari 46,25 menjadi 70,63 poin. Setelah 2015–2019, aspek Hak-hak Politik menunjukkan tren menurun, walaupun masih dalam kategori “sedang”. Pada 2020, aspek Hak-hak Politik mengalami penurunan lagi menjadi 67,85.
- Aspek Lembaga Demokrasi selama periode 2009–2020 selalu berada pada kategori “sedang” dengan capaian terendah pada 2016 sebesar 62,05 dan tertinggi pada 2019 sebesar 78,73 poin. Sedangkan pada 2020 kembali menurun menjadi 75,66.

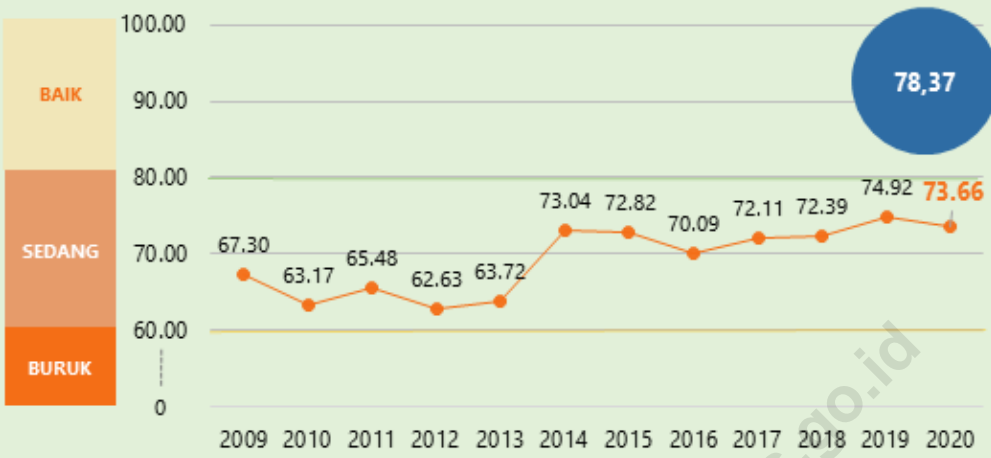
Pada periode 2019–2020, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik” turun dari 7 provinsi menjadi 5 provinsi. Terdapat 29 provinsi yang masuk ke kategori “sedang” dan sudah tidak ada provinsi yang masuk dalam kategori “buruk”. DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai IDI sebesar 89,21; diikuti oleh Gorontalo dengan nilai IDI sebesar 83,21. Posisi ketiga adalah Kalimantan Timur dengan nilai IDI sebesar 81,99. Posisi keempat ditempati oleh D.I Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 81,59, dan posisi kelima ditempati oleh Kalimantan Barat dengan capaian IDI sebesar 81,09.

Dibandingkan dengan capaian IDI pada 2019, terdapat 17 provinsi mengalami peningkatan dan 17 provinsi mengalami penurunan angka IDI di 2020. Dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar terjadi di Gorontalo dan Jambi, masing-masing meningkat sebesar 6,92 poin dan 5,77 poin. Sementara, 2 provinsi yang mengalami penurunan IDI terbesar terjadi di Jawa Timur dan Kalimantan Tengah, masing-masing menurun sebesar 6,97 poin dan 6,25 poin.

# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TAHUN 2020



## Perkembangan IDI 2009-2020



**IDI 2020**  
**73,66**

**Turun 1,26 poin**  
Tingkat Demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam kategori **SEDANG**

## 3 ASPEK IDI



**79,40** **2,20 poin**  
Kebebasan Sipil

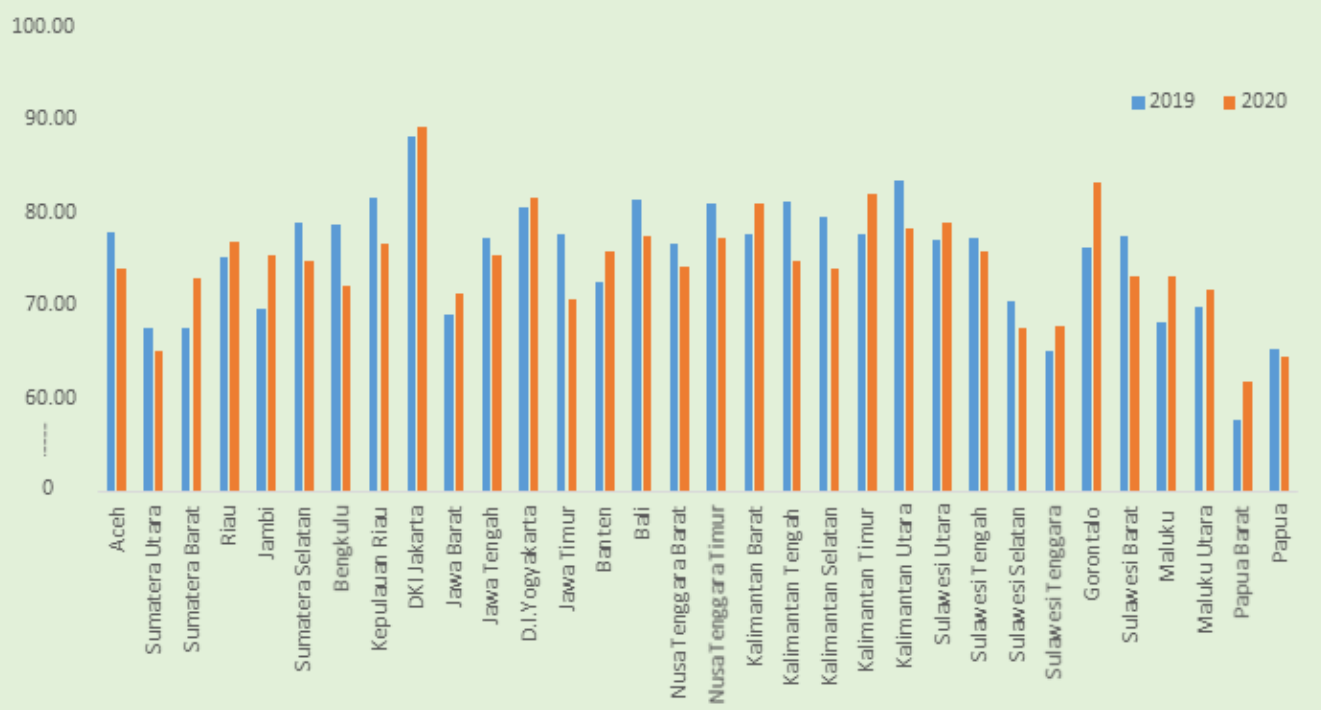


**67,85** **2,86 poin**  
Hak-Hak Politik



**75,66** **3,07 poin**  
Lembaga Demokrasi

## Perkembangan IDI Berdasarkan Provinsi, 2019-2020



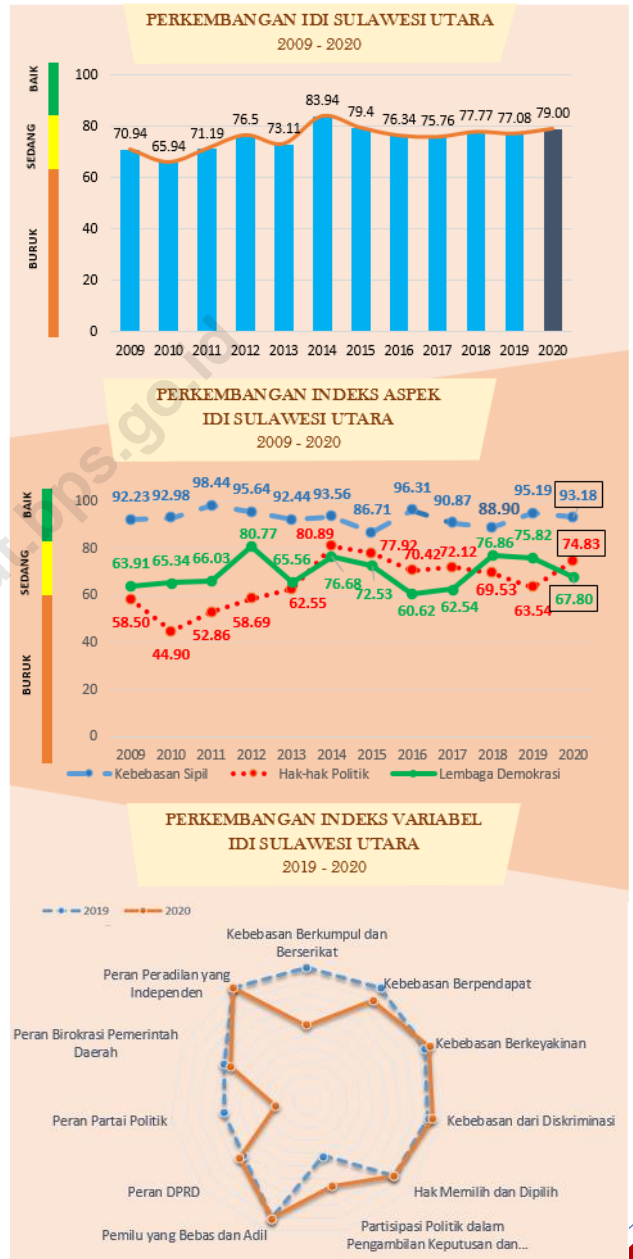
# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA 2020

6

Pada tahun 2020 capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Utara mencapai 79,00 poin. Dalam kategori yang digunakan IDI, capaian ini tergolong “sedang”, artinya IDI melihat kualitas demokrasi di Sulawesi Utara secara umum masih dalam kondisi “sedang”. Capaian tahun 2020 tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2019 sebesar 77,08. Peningkatan 1,92 poin secara kualitatif belum bisa mengubah kategori kualitas capaian secara keseluruhan, yaitu masih tetap dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada awal mulai dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 70,94. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 83,94, namun kembali turun hingga 2017, dan membaik sejak 2018, yaitu menjadi 77,78 dan terus naik menjadi 79,00 pada tahun 2020.

IDI dirancang untuk menangkap denyut nadi demokrasi dalam tahun yang diukur. Indikator-indikator penyusunnya dimaksudkan untuk menangkap demokrasi sebagaimana tercermin pada kejadian sehari-hari. Sebagaimana denyut nadi, capaian IDI bisa naik dan turun berdasarkan banyaknya “peristiwa-peristiwa” yang sesuai dengan demokrasi atau sebaliknya bertentangan dengan demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi di suatu wilayah.



## 1. Indeks Aspek IDI

Angka IDI 2020 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 93,18; aspek Hak-hak Politik yang bernilai 74,83 dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 67,80. Satu dari tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, sedangkan dua dari tiga aspek demokrasi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Indeks aspek Kebebasan Sipil menurun 2,01 poin dibandingkan kondisi pada tahun 2019 yang mencapai angka 95,19. Indeks aspek Lembaga Demokrasi juga mengalami penurunan sebesar 8,02 poin dibandingkan perolehan pada tahun 2019. Dan Indeks Hak-hak Politik mengalami peningkatan sebesar 11,18 poin dibandingkan perolehan pada tahun 2019.

Serupa dengan kondisi pada tahun 2019, tidak lagi ditemukan indeks aspek yang berkategori “buruk” pada tahun 2020. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik” hingga tahun 2020. Sementara itu, pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2011 tercatat stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, ketika aspek ini menembus kategori “baik”, kemudian menurun ke kategori “sedang” dan bertahan sampai dengan 2020. Capaian aspek Lembaga Demokrasi dalam IDI Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar 67,80 poin, turun 2,02 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, yaitu 75,82 poin. Capaian tahun 2020 bukanlah capaian tertinggi maupun terendah sepanjang 2009-2020. Capaian Lembaga demokrasi tidak pernah berubah kategori dari sepanjang tahun 2009-2020 selalu ada pada kategori “sedang”, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan 2018 yaitu sebesar 76,68.

## 2. Indeks Variabel IDI

Pada Tahun 2020 terdapat 4 (empat) variabel yang mengalami peningkatan indeks, 5 (lima) variabel mengalami penurunan dan 2 (dua) variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Dari 4 (empat) variabel yang mengalami peningkatan paling besar yaitu variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, sebesar 22,89 poin (dari 42,39 pada tahun 2019 menjadi 65,28 di tahun 2020), ini mengakibatkan peningkatan capaian dari “buruk” menjadi “sedang” pada tahun 2020. Selain variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan, ketiga variabel lain juga mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu variabel Peran DPRD mengalami peningkatan sebesar 4,07 poin (dari 60,93 pada tahun 2019 menjadi 65,00 di tahun 2020). Kemudian variabel Kebebasan dari Diskriminasi mengalami peningkatan sebesar 3,48 poin (dari 89,99 pada tahun 2019 menjadi 93,47 di tahun 2020). Dan variabel terakhir yang mengalami peningkatan adalah variabel Kebebasan Berkeyakinan yaitu dari 95,86 pada tahun 2019 menjadi 98,94 pada tahun 2020.

Di sisi lain, variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat menurun secara tajam sebesar 43,75 poin, dari 100 pada 2019 menjadi 56,25 pada 2020. Penurunan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, yang semula berada di kategori “baik” pada tahun 2019 dan memasuki kategori “buruk” pada tahun 2020. Variabel Peran Partai Politik juga mengalami penurunan nilai indeks yang cukup signifikan yaitu sebesar 38,57 poin, yaitu dari 61,43 (2019) menjadi 22,86 (2020), yang juga mengubah posisi variabel Peran Partai Politik menjadi kategori “buruk” pada 2020 dari sebelumnya tercatat sebagai kategori “sedang” (2019). Demikian pula variabel Kebebasan Berpendapat yang mengalami penurunan sebesar 10,41 poin, dari 100 (2019) menjadi 85,59 (2020). Variabel lain yang juga mengalami penurunan nilai indeks adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, yang menurun sebesar 5,38 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya (67,12 pada 2019 menjadi 61,74 di 2020). Peningkatan tersebut tidak mengubah posisi variabel Peran Pemerintah Daerah yaitu tetap pada capaian “sedang”. Sedangkan variabel Hak Memilih dan Dipilih, yang juga mengalami penurunan nilai indeks namun tidak mengalami pergeseran capaian. Jika di tahun 2019 variabel Hak Memilih dan Dipilih bernilai 84,69 maka pada tahun 2020 variabel ini turun sebanyak 0,31 poin, menjadi 84,38 dengan capaian kinerja bernilai “baik”.

### 3. Skor Indikator IDI

Pada tahun 2020, dari 28 indikator IDI, tercatat 19 indikator yang memiliki skor dengan kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu:

- a. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- b. Indikator 3, Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- c. Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,
- d. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama,
- e. Indikator 6, Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama,
- f. Indikator 7, Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama,
- g. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok,
- h. Indikator 9, Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok,
- i. Indikator 10, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok,
- j. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih terhambat,
- k. Indikator 12, Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih,



# INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA 2020

6

- l. Indikator 14, *Voters turnout*,
- m. Indikator 15, Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi,
- n. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu,
- o. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara,
- p. Indikator 20, Alokasi anggaran pendidikan dan/ alokasi anggaran kesehatan,
- q. Indikator 24, Persentase perempuan pengurus partai politik,
- r. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial, dan
- s. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi

Namun demikian, pada tahun 2020 masih ditemukan 6 (enam) indikator demokrasi dengan skor berkategori “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar dapat mencapai kinerja IDI yang lebih baik. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 1, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- b. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- c. Indikator 21, Perda yang merupakan inisiatif DPRD,
- d. Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif,
- e. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu, dan
- f. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

## PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR SULAWESI UTARA 2019 - 2020

| No | Aspek/Indikator  | 2019         | 2020         |
|----|--|--------------|--------------|
|    | <b>Kebebasan Sipil</b>   | <b>95.19</b> | <b>93.18</b> |
| 1  | Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100.00       | 50.00        |
| 2  | Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat        | 100.00       | 100.00       |
| 3  | Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat              | 100.00       | 87.50        |
| 4  | Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat                     | 100.00       | 100.00       |
| 5  | Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama                                      | 95.65        | 100.00       |
| 6  | Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama                               | 90.63        | 90.63        |
| 7  | Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama                                   | 100.00       | 100.00       |
| 8  | Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok                                   | 83.33        | 83.33        |
| 9  | Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok                       | 87.50        | 100.00       |
| 10 | Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok                     | 100.00       | 100.00       |

| No | Aspek/Indikator  | 2019         | 2020         |
|----|--|--------------|--------------|
|    | <b>Hak-Hak Politik</b>   | <b>69.53</b> | <b>74.83</b> |
| 11 | Hak memilih atau dipilih terhambat   | 95.51        | 97.44        |
| 12 | Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih | 95.51        | 95.51        |
| 13 | Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)  | 76.68        | 76.68        |
| 14 | Voters turnout   | 83.31        | 83.31        |
| 15 | Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi           | 96.03        | 93.03        |
| 16 | Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan                                    | 63.04        | 75.00        |
| 17 | Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan                   | 21.74        | 55.55        |

| No | Aspek/Indikator  | 2019         | 2020         |
|----|--|--------------|--------------|
|    | <b>Lembaga Demokrasi</b>   | <b>76.86</b> | <b>67.80</b> |
| 18 | Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu                                   | 86.36        | 86.36        |
| 19 | Kecurangan dalam penghitungan suara  | 94.94        | 94.94        |
| 20 | Alokasi anggaran pendidikan dan/ alokasi anggaran kesehatan                      | 91.45        | 97.63        |
| 21 | Perda yang merupakan inisiatif DPRD  | 0.00         | 0.00         |
| 22 | Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif  | 3.57         | 3.57         |
| 23 | Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu                         | 51.74        | 14.29        |
| 24 | Persentase perempuan pengurus partai politik                                     | 100.00       | 100.00       |
| 25 | Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 97.37        | 65.79        |
| 26 | Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah                           | 41.66        | 58.33        |
| 27 | Keputusan hakim yang kontroversial   | 100.00       | 100.00       |
| 28 | Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi                 | 100.00       | 100.00       |

## Penutup

Data IDI sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan politik dan demokrasi sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah baik dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan bidang politik maupun dalam mengambil kebijakan sangat bergantung kepada *stakeholder* yang terkait, mulai dari kelompok kerja IDI dalam menyosialisasikan data IDI, pemerintah/instansi hingga partai politik yang terlibat dalam pengumpulan data IDI. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan serta untuk meningkatkan perkembangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat.

<https://sulut.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jl. 17 Agustus Manado, 95119

Telp: (0431)847044, Fax: (0431)862204

Email: [bps7100@bps.go.id](mailto:bps7100@bps.go.id), Website: <https://sulut.bps.go.id>

ISBN 978-602-5673-60-3 (PDF)



9 786025 673603